

Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Sertipikat Ganda Yang Dijaminkan Di Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/Pn Sak) = Legal Position Of Double Certificates, One of Which Is Guaranteed at The Bank (Case Study Decision Number 28/Pdt.G/2019/Pn Sak)

Intan Permata Ningrum, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540500&lokasi=lokal>

Abstrak

<p>Penelitian ini menganalisis aspek kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam kasus sertipikat tanah ganda. Dalam praktik kredit tidak semua debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditur berhak untuk menjual jaminan lewat lelang umum saat debitur gagal memenuhi kewajibannya, namun seringkali terjadi obyek yang menjadi jaminan menjadi obyek sengketa salah satunya terkait sertipikat ganda sehingga kreditur tidak dapat menjual obyek yang menjadi jaminan. Apabila setelah debitur telah mendapatkan pinjaman seharusnya debitur menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini terjadi karena apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, Pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek yang menjadi jaminan secara lelang umum dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang yang belum dibayar. Urgensi dilakukannya penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan di tengah fenomena sertipikat tanah ganda, guna mengatasi ketidakpastian hukum sehingga memastikan integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis yuridis-kualitatif terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Pertanahan, sebagai entitas penerbit sertipikat, memiliki tanggung jawab untuk membatalkan salah satu sertipikat ganda dan mengumumkannya secara publik sebagai bentuk kepastian hukum bagi kreditur pemegang obyek jaminan.

.....This research analyzes aspects of the legal position of creditors holding mortgage rights in multiple land certificate cases. In credit practice, not all debtors can fulfill their debt payment obligations, so creditors have the right to sell collateral through a public auction when the debtor fails to fulfill their obligations, but it often happens that the object that is collateral becomes a guaranteed object, one of which is a double certificate so that the creditor cannot sell the object that is collateral. If after the debtor has received a loan, the debtor should complete his obligation to pay the agreed debt. This happens because if they do not fulfill the requirements stipulated in Article 6 of the Mortgage Rights Law, the holder of mortgage rights has the right to sell the object that is collateral at public auction and use the proceeds of the sale to pay off unpaid debts. The urgency of conducting this research is to provide an understanding regarding the legal position of creditors holding mortgage rights amidst the phenomenon of multiple land certificates, in order to provide legal protection so as to guarantee the integrity and trust of the public in the land system. The method used in this research is doctrinal research with a literature review approach and juridical-qualitative analysis of applicable regulations. In this case, the Land Office, as the certificate issuing entity, has the responsibility to cancel one of the double certificates and announce it publicly as a form of legal certainty for creditors holding collateral objects</p>